

POHON KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 (RENSTRA 2024 - 2026)

ISU / MASALAH POKOK	Masih rendahnya layanan persampahan			Lemahnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup		Masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan			Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap PPLH				Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik DLH		Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH		
MASALAH	Rendahnya pengelolaan sampah	Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	Menyediakan Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Penanganan Limbah B3	Belum adanya dokumen RPPLH	Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan	Masalah Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan	Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH	Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH	Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH	Masih rendahnya Profesionalitas ASN	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja		
AKAR MASALAH	Terbatasnya sarpras persampahan, Kurangnya kualitas dan kuantitas, SDM Bidang Lingkungan Hidup, Belum adanya kebijakan strategis pengelolaan sampah, Masih	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan persampahan, Lemahnya peran kelurahan dan	Masih rendahnya Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengendalian dan penanganan limbah B3, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat	Belum disusunnya dokumen RPPLH, Belum adanya pengendalian pelaksanaan RPPLH	Minimnya SDM dan Sarana dan Prasarana penunjang penataan RTH, Belum adanya PERDA Taman Pemakaman	Tidak adanya dokumen uji kualitas lingkungan hidup, Belum tersedia dokumen standart baku mutu lingkungan	Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Belum berfungsinya	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan pencemaran lingkungan, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) yang bersertifikat, Luasnya wilayah cakupan pelayanan pembinaan, Belum diikutinya diklat pengawasan lingkungan hidup	Kurangnya koordinasi lintas sektor, Belum maksimalnya penerapan sanksi	Belum adanya data dan informasi profil MHA, Belum maksimalnya peran serta MHA terhadap PPPLH	Kurangnya informasi/edukasi terkait PPPLH	Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang lingkungan hidup	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja DLH	Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja		
MISI	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup												Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup												Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada DLH	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH			
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)												Indeks kualitas pelayanan publik DLH	Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			
SASARAN	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup												Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup		
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Indeks Kualitas Air			Indeks Kualitas Udara			Indeks Kualitas Lahan		Persentase Penanganan sampah perkotaan			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Nilai SAKIP			
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3		Program Pengelolaan Persampahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
PENANGGUNG JAWAB	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan		Bidang Tata Lingkungan			Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			Sekretariat		Sekretariat			

Maumere, 3 November 2025


Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,
Drs. ADE DATUS BUANG DA CUNHA